



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL,
DUALISME KURIKULUM, DAN
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Kebijakan Ujian Nasional, Konsep, Problematika dan Prospektif <i>Djemari Mardapi</i>	1-6
2. Tantangan Global Kurikulum 2013: Mensinergikan Karakter Kompetitif dan Solidaritas Peserta Didik <i>Ali Imron</i>	7-15
3. Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Karakter dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 <i>Imron Arifin</i>	16-22
4. Optimalisasi Peran dan Tugas Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 <i>Imam Gunawan</i>	23-29
5. Penerapan Kurikulum 2013 Versus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan <i>Retno Indah Rahayu</i>	30-34
6. Kontribusi Pendidikan Nilai Berbasis Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Sebagai Penyelaras Kurikulum 2013 <i>Sulthoni</i>	35-41
7. Guru Sebagai Aktor Supervisi Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum 2013 <i>Maisyaroh</i>	42-46
8. Pendekatan Belajar Aktif dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Pendidikan Anak Usia Dini <i>Pramono</i>	47-53
9. Kurikulum Tahun 2013 Ditinjau dari Konsep Pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif <i>Bambang Budi Wiyono</i>	54-61
10. Penilaian yang Efektif Dalam Implementasi Kurikulum 2013 <i>Eny Nur Aisyah</i>	62-65
11. Strategi Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar (Best Practices Pada Sekolah Sasaran Kurikulum 2013 Di Kota Malang) <i>Agus Wahyudi</i>	66-74
12. Kurikulum Ideal Untuk Indonesia <i>Ifit Novita Sari</i>	75-80
13. Implementasi Kurikulum PAUD 2013 dalam Mewujudkan Anak Indonesia Harapan <i>I Wayan Utama</i>	81-91
14. Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pengembangan Pendidikan Karakter <i>Diah Puji Nali Brata</i>	92-97

KURIKULUM IDEAL UNTUK INDONESIA

Ifit Novita Sari

Universitas Kanjuruhan Malang
vita_ifitnovitasari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kelembuan kurikulum ini terjadi akibat implementasi Kurikulum 2013 yang kurang matang dan terbilang sesaat-gesa. Dunia pendidikan tergoncang lagi dengan munculnya kebijakan Menteri Pendidikan Anis Baswedan, bahwa kurikulum berubah kembali ke kurikulum KTSP 2006. Ungkapan bahwa jika 'berganti menteri ganti menteri berganti pula kurikulumnya' sudah sering terlontar baik dikalangan pendidik maupun masyarakat, kini terbukti. Kondisi inilah yang membuat tenaga pendidik dan peserta didik menjadi bingung. Seharusnya, pemerintah bisa menentukan satu diantara dua kurikulum mana yang akan diterapkan. Pemerintah seyogyanya ketika akan menerapkan kurikulum baru, melakukan sosialisasi sedini dan semaksimal mungkin, agar ketika kurikulum itu akan diterapkan sudah bisa langsung dilaksanakan oleh para pelaksana yang berkaitan dengan penerapan kurikulum baru juga dipersiapkan dengan cermat, buku-buku penunjang, pelatihan kepada guru juga perlu disiapkan untuk menyambut diberlakukannya kurikulum baru. Jika semuanya sudah siap maka ketika kurikulum baru diberlakukan maka tidak akan terjadi 'penolakan' di tataran pelaksana.

Berangkat dari wacana diatas dan realita yang kerap terjadi di dunia pendidikan terkait kurikulum, mestinya pemerintah selaku pembuat kebijakan menentukan dengan cermat model kurikulum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Bidang lain yang berkaitan langsung dengan suksesnya pelaksanaan kurikulum juga perlu digarap, seperti kualifikasi dan profesionalisme guru selaku pelaksana kurikulum. Jika kualifikasi dan profesionalisme guru baik, maka apapun kurikulum yang akan diterapkan tidak akan berdampak 'penolakan' dari guru, karena para guru sudah profesional. Mereka akan tahu dengan segera apa yang harus dilakukan dengan adanya kurikulum baru. Guru sebagai pelaksana kurikulum merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar.

Kata Kunci: kurikulum, model kurikulum, pengembangan, guru

PENDAHULUAN

Polemik dunia pendidikan di Indonesia terkait dengan dualisme kurikulum sudah sangat memuncak dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah selaku pembuat kebijakan. Situasi ini meresahkan para guru, karena gurulah yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 'kekacauan' ini. Mulai dari pembuat regulasi sendiri sampai pada guru sebagai pelaksana regulasi tersebut. Jika merujuk pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa sejatinya pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. Berangkat dari tuntutan perubahan jaman inilah kebijakan pembuatan kurikulum 2013 dibuat. Kurikulum sebelumnya dinilai kurang mampu mengakomodir tantangan jaman saat ini. Dimana globalisasi semakin menerjang masuk dengan leluasa tanpa batas ke segala bidang, demikian pula di bidang pendidikan.

Kurikulum harus bersifat dinamis, artinya selalu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan jaman yang dialami oleh masyarakat. Manusia berkembang sesuai dengan kebutuhannya, pembaharuannya mulai dari sisi norma, sistem nilai, budaya bahkan pendidikan yang akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) baru. Para pengembang kurikulum termasuk guru harus bisa mengakomodir situasi perkembangan tersebut, menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap harapan masa depan. Tugas guru sebagai tenaga pendidik adalah menghasilkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas seiring dengan tuntutan jaman yang semakin maju dan global. Kurikulum yang dibuat harus selalu dievaluasi untuk perbaikan kualitas pendidikan.

Inovasi di bidang pendidikan sangat beragam, mulai dari rekayasa media pembelajaran strategi pembelajaran dan aktivitasnya pun sudah bermacam-macam. Semua itu tak lepas dari kreatifitas dari guru. Inovasi tersebut dibuat sedemikian rupa karena melihat perkembangan peserta didik saat ini yang sudah beda perspektifnya dengan peserta didik di era sebelum sekarang. Kemajuan IPTEK pun turut andil merubah perpesktif tersebut. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK menjadi dasar munculnya kreatifitas guru.

IPTEK yang maju belum didukung oleh kualifikasi dan profesionalisme guru di Indonesia. Ini terlihat ketika ada sebagian guru yang masih 'gaptek' (gagap teknologi) dibanding peserta didiknya. Tidak semua guru bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman saat ini. Paradigma 'mengajar' pada pendidikan di Indonesia masih belum pada taraf 'mendidik' yang sebenarnya karena konteks 'mengajar' dan 'mendidik' esensinya sangat berbeda.

PERANAN KURIKULUM

Kurikulum dilambangkan sebagai rohnya pendidikan karena merupakan penentu arah dan proses pendidikan. Ibarat peta, kurikulum menjadi pedoman dan penunjuk arah pendidikan. Visi dan misi sebuah lembaga pendidikan dituangkan dalam bentuk kurikulum yang menjadi pedoman terlaksananya visi dan misi tersebut. Harapannya adalah output berupa sumber daya manusia yang handal, memiliki sifat tanggung jawab, kreatif, ahli, inovatif, dan menjadi pribadi yang berkarakter. Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan sebuah bangsa. Bangsa akan menjadi maju apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas atau bermutu tinggi (Rosmaniar, 2013).

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus indikator mutu pendidikan (Muryani dkk, 2013). Kurikulum punya peran besar dalam menyukseskan pendidikan, karena semua perencanaan pendidikan tertuang dalam kurikulum. Mulai dari tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang tertuang pada Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan juga bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta tenaga pengajarnya (Nasution, 2008 dalam Muryani dkk, 2013). Kurikulum juga diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah, jadi selain kegiatan kurikuler yang formal juga kegiatan yang tak formal. Merujuk pernyataan di atas bahwasannya kurikulum merupakan acuan utama dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah dalam segala aspek. Tanpa adanya kurikulum niscaya roda pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak punya tujuan pasti akan dibawa kemana pendidikan di sekolah tersebut. Mengutip pernyataan Nana Sudjana (2005) dalam Muryani dkk (2013), mengartikan bahwa kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan akan diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik.

Lebih detail ada tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis/evaluatif (Oemar Hamalik, 1990). Pertama, peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa menga

perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang (Nursyamsi, 2010-wordpress.com).

Kurikulum harus berisi hal-hal yang bisa membantu peserta didik mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Sudjana (1993) secara umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum yakni: (1) perubahan dalam tujuan. Perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat dan nilai-nilai bangsa, (2) perubahan isi dan struktur. Perubahan ini meninjau struktur mata pelajaran-mata pelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk isi dari setiap mata pelajaran, (3) perubahan strategi kurikulum. Perubahan ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan sistem penilaian hasil belajar, (4) perubahan sarana kurikulum. Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantitas, juga sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain, dan (5) perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Perubahan ini menyangkut metode/cara yang paling tepat untuk mengukur/menilai sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efisien, relevan dan efektivitas terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum (Fitriya, 2014-esspot.com).

Untuk mengukur efektivitas kurikulum, maka perlu diadakan evaluasi. Hal ini dikarenakan kurikulum adalah suatu program yang berisi tentang tujuan, isi/materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi, peserta didik, lingkungan dan guru yang saling tergantung satu sama lainnya. Perencanaan kurikulum merupakan tahap awal untuk pengembangan kurikulum, kemudian tahap pelaksanaan hingga evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah sudah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan kurikulum tersebut. Setelah dilakukan evaluasi dan dilihat hasilnya, maka dimungkinkan untuk melakukan pengembangan terhadap kurikulum tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yakni: (1) perguruan tinggi (PT). Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari PT. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di PT umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan, (2) masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya, dan (3) sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diwujudkan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum (Sukmadinata, 2014). Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Revisi kurikulum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta memberikan acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan.

MODEL KURIKULUM

Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai potensi kekayaan yang luar biasa. Ragam suku yang banyak tersebar di seluruh pelosok nusantara juga menjadi aset yang sangat besar terhadap kekayaan ragam seni, budaya, bahasa, adat istiadat, lingkungan dan keterampilan yang beraneka ragam. Potensi ini haruslah dikembangkan dan diwariskan kepada anak bangsa baik sekarang atau pada masa mendatang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan semangat kesetiakawanan sosial. Melihat kondisi seperti diatas, sebaiknya model kurikulum yang ideal di Indonesia adalah model kurikulum bermuatan lokal dan model kurikulum yang berorientasi pada kecakapan hidup.

Model Kurikulum Bermuatan Lokal

Mengutip UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 BAB X tentang kurikulum Pasal 36 ayat, bahwa: (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan ayat (3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah disebutkan dengan jelas tentang keberagaman potensi bangsa Indonesia, tetapi mengapa para pembuat kebijakan tidak mengacu pada Undang-Undang tersebut, sehingga yang terdapat adalah polemik dan 'kesemerawutan' kurikulum di dunia pendidikan.

Jika saja para pembuat regulasi tersebut memahami apa yang tercantum dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2003 itu dimaknai dengan bijak, maka potensi anak-anak bangsa akan melejit sesuai dengan kekayaan wilayahnya masing-masing. Pembuatan kurikulum tidak harus seragam seluruh Indonesia, karena perbedaan letak wilayah, adat istiadat, budaya, bahasa, dan lingkungan. Dalam Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP (2006) dijelaskan bahwa muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak selamanya menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak tertera pada mata pelajaran keterampilan (Arifin, 2014).

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan sungguh sangat disayangkan, kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan potensi daerah yang dituangkan pada muatan lokal justru tidak diakomodir dengan baik oleh pelaksana di daerah. Hal inilah yang menjadi persoalan tambahan bagi pemerintah. Entah salah dimananya, karena memang antara pembuat kebijakan dan pelaksana (kepala sekolah, guru dan komite) seharusnya seiring sejalan dalam memaknainya. Kualifikasi dan profesionalisme guru belum menunjang tercapainya kompetensi muatan lokal, jika saja paradigma keseragaman masih melekat di benak para guru. Seharusnya guru bisa membidik adanya perbedaan dan menjadikan kompetensi muatan lokal sebagai potensi unggulan bagi wilayahnya masing-masing.

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh sekolah melalui komite sekolah (*stakeholders*), membutuhkan penanganan yang serius. Dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaannya juga perlu berkoordinasi dengan lingkungan setempat, agar pelaksanaan muatan lokal bisa maksimal dan mendapat dukungan dari masyarakat. Langkah-langkah pengembangan muatan lokal oleh *stakeholders* sebagai berikut: (1) mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah, (2) menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal, (3) mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal, (4) menentukan mata pelajaran muatan lokal, (5) mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP (Arifin, 2014).

Kemudian siapa sajakah yang akan terlibat dalam pengembangan model kurikulum bermuatan lokal? Tentu saja sekolah dan komite selaku *stakeholders* yang mempunyai wewenang penuh dalam proses pengembangan tersebut. tugas tersebut tentunya juga didukung sepenuhnya oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Dinas Pendidikan daerah setempat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi dan instansi di luar Dinas Pendidikan. Langkah-langkah pengembangan muatan lokal yang mempunyai rencana strategi (renstra) pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, dimaksudkan agar renstra tersebut sejalan dengan muatan lokal yang hendak dikembangkan, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia bergaya guna seperti yang dimaksud dalam renstra masing-masing daerah, departemen lain yang terkait, (3) dunia usaha/industri yang tentu saja sangat membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan, dan (4) tokoh masyarakat.

Model Kurikulum Berorientasi Kecakapan Hidup

Konsep kecakapan hidup memang menjadi perhatian para ahli pengembang kurikulum karena kecakapan hidup dan bekerja merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kecakapan hidup harus menggambarkan aspek: (1) kompetensi yang relevan untuk dikuasai peserta didik, (2) materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, (3) kegiatan pembelajaran

... menguasai kompetensi, (4) fasilitas, alat dan sumber belajar yang menunjang dan ... dan (5) kompetensi yang dapat diaktualisasikan dalam pola kehidupan peserta didik sehari-hari (Arifin, 2014:238).

Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai ... yakni mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya pada masa ... dan mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan, dan ... yang dibutuhkan dalam menajaga kelangsungan hidup dan mengembangkan dirinya ... mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus ... pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk: (1) mengaktualisasikan potensi peserta didik ... dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi, (2) memberikan wawasan ... luas mengenai pengembangan karier peserta didik, (3) memberikan bekal dengan latihan ... tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, (4) memberikan ... kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual ... dengan prinsip pendidikan berbasis luas (*broad-based education*), (5) mengoptimalkan ... pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dengan prinsip manajemen berbasis sekolah ... (*school-based management*), dan (6) memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap dan perbuatan ... peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan penerapan nilai kehidupan sehari-hari ... dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya (Arifin, 2014:241).

Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk ... mempersiapkan peserta didik agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup ... kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi ... mampu mengatasinya. Arifin (2014:252) menjelaskan tentang langkah-langkah yang bisa ... dalam pengembangan kurikulum berorientasi kecakapan hidup yang diintegrasikan ... mata pelajaran: (1) mengidentifikasi unsur kecakapan hidup yang dikembangkan dalam ... nyata yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, (2) mengidentifikasi ... pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang mendukung dan mengandung kecakapan ... (3) mengklasifikasi materi/bahan dalam bentuk topik/tema dari mata pelajaran yang sesuai ... kecakapan hidup, (4) menyusun skenario pembelajaran termasuk pendekatan, strategi, ... metode pembelajaran, dan (5) merancang bentuk dan jenis penilaian.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan hidup: (1) tidak mengubah ... pendidikan dan kurikulum yang berlaku, (2) pembelajaran menggunakan prinsip empat ... yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to ...*), belajar untuk melakukan atau berbuat (*learning to do*), belajar untuk mencapai kehidupan ... sama (*learning to life together*), (3) menggunakan model pembelajaran kontekstual yaitu ... mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dengan menggunakan potensi lingkungan ... sebagai wahana pendidikan, (4) menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah (*problem ... based interaction*), (5) menggunakan model pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dan ... pendidikan realistik (*realistic education*), dan (6) berorientasi kepada tercapainya hidup ... dan berkualitas, memperluas wawasan dan pengetahuan dan memiliki akses untuk ... memenuhi standar hidup secara layak (Latifa, 2014-wordpress.com).

KUTUP

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu kurikulum ... tidak harus ada. Kurikulum pada hakekatnya merupakan alat untuk mencerdaskan anak bangsa ... ia bermakna bagi kehidupannya, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota ... masyarakat maupun sebagai warga negara, karenanya dalam pengembangan kurikulum janganlah ... lupakan nilai-nilai baik kehidupan untuk diinternalisasikan pada kurikulum yang akan dipakai di ...

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ... pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ... untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus mampu

menginterpretasikan maksud yang terkandung dalam kurikulum. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru dituntut memiliki kompetensi yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan. Kompetensi yang dimaksud meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional, yang bersifat holistik. Dalam hubungannya dengan pengembangan kurikulum, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru sebagai profesional memiliki konsekuensi, semua aktivitas guru harus mengarah pada pengembangan profesional. Oleh karena itu hendaknya, pengakuan profesionalitas tersebut menjadi bagian tanggungjawab guru untuk terus menerus memperbaiki diri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. 2014. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta: Depdiknas
- Rosmaniar, A. 2013. Perkembangan Kurikulum dan Permasalahannya. *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknologi Pendidikan Unnes*.
- Sri Muryani, dkk. 2013. Identifikasi Kemampuan Mengembangkan Kurikulum dalam Implementasi KTSP di Kalangan Guru SMK-BM di Kota Salatiga. *Jurnal Satya Widya*, Volume 29, Nomor 2 Juli 2013.
- Sukmadinata, NS. 2014. *Pengembangan Kurikulum. Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- <https://indrienola.wordpress.com/2014/03/17/makalah-telaah-model-model-kurikulum/> diakses tanggal 10 Mei 2015.
- <http://hidayatulfitriya.blogspot.com/2014/02/sejarah-kurikulum-di-indonesia-1945-2013.html> diakses tanggal 9 Mei 2015.
- <https://neozonk.wordpress.com/2010/11/01/peranan-kurikulum/> diakses tanggal 10 Mei 2015.



ISBN 9786027182080



9 786027 182080



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN



SERTIFIKAT

Nomor: 15.5.1/UN32/TU/2015

diberikan kepada

Ifit Novita Sari, S.Sos., M.Pd

atas partisipasinya sebagai

PEMAKALAH

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan

dengan tema:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL, DUALISME KURIKULUM, DAN
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Tanggal 15–16 Mei 2015

di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.
NIP. 19640312 199001 1 001